

TESIS

**STRATEGI KOMUNIKASI LINGKUNGAN BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM REHABILITASI
MANGROVE DI DUSUN TANROE DESA BABABINANGA
KABUPATEN PINRANG**

**ENVIRONMENTAL COMMUNICATION STRATEGY
COMMUNITY PARTICIPATION MANGROVE
REHABILITATION TANROE HALMET BABABINANGA
VILLAGE PINRANG REGENCY**

**OLEH:
MUH. CHAERUL
E022202024**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**STRATEGI KOMUNIKASI LINGKUNGAN BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM REHABILITASI
MANGROVE DI DUSUN TANROE DESA BABABINANGA
KABUPATEN PINRANG**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelas magister

Program Studi Ilmu Komunikasi

Disusun dan diajukan oleh

MUH. CHAERUL

E022202024

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

STRATEGI KOMUNIKASI LINGKUNGAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM REHABILITASI MANGROVE DI DUSUN TANROE DESA BABABINANGA KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diajukan oleh

MUH. CHAERUL

E022202024

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **05 Juni 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc
NIP 19520412 197603 1 017

Pembimbing Pendamping,



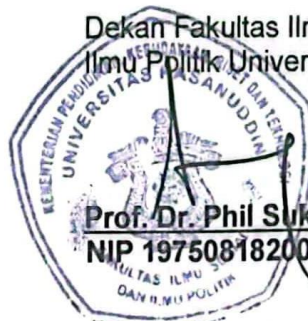
Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si
NIP 19620118 198702 1 001

Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi,



Prof. Dr. Muh. Akbar, M.Si
NIP 19650627 199103 1 004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil Sukri, SIP., M.Si
NIP 197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Chaerul
NIM : E022202024
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul **“STRATEGI KOMUNIKASI LINGKUNGAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM REHABILITASI MANGROVE DI DUSUN TANROE DESA BABABINANGA KABUPATEN PINRANG”** adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Juni 2024

Yang menyatakan



Muh. Chaerul

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-nya peneliti dapat melalui segala proses dan menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini peneliti mengangkat judul “Strategi Komunikasi Lingkungan Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Mangrove di Dusun Tanroe Desa Bababinanga Kabupaten Pinrang”. Tujuan dari penyusunan tesis ini ialah untuk memenuhi syarat dan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom) pada Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan tesis ini peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa selesainya tesis ini tidak lepas dari dukungan, semangat serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil, oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, dan pengertian yang tak henti-hentinya diberikan kepada peneliti.

Selain itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Phill. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf Pascasarjana Fisip Unhas

3. Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc selaku Pembimbing Utama peneliti yang telah mencurahkan banyak waktu berharganya dan tidak pernah bosan mengingatkan peneliti untuk menyelesaikan tesis ini
4. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si selaku Pembimbing kedua yang telah mengingatkan peneliti menyelesaikan tesis dan membimbing peneliti untuk menyelesaikan tesis ini
5. Prof. Dr. Muh. Akbar, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin
6. Makkarennu, S.Hut., M.Si., Ph.D selaku penguji yang memberikan masukan dan arahan dalam rangka kesempurnaan tesis ini
7. Dr. H. M. Iqbal Sultan, M.Si selaku penguji yang memberikan masukan dan arahan dalam rangka kesempurnaan tesis ini
8. Prof. Dr. Tuti Bahfiarti, M.Si selaku penguji yang memberikan masukan dan arahan dalam rangka kesempurnaan tesis ini
9. Kaharuddin, S.Hut., Handoyo, S.Pi, M.Si., Muh. Taiyep, IPTU Bakri, M. Sila serta seluruh masyarakat Desa Bababinanga sebagai Informan dan responden penelitian ini.
10. Kak Elfrianto, ST., M.Ikom., Kak Rasni Gani, M.Ikom., Kak Edi Sumardi, S.Pd., Tita Islaq, M.Ikom., Ikramullah Mahdi, M.Ikom.,

Kurniawan, M.Ikom., Hardianti Kamaluddin, M.Ikom., Nesyi Sifra, M.Ikom, Danial, M.Ikom mahasiswa magister kawan berdiskusi dan mendukung menyelesaikan studi.

11. Try Hermawan, S.Pd., Ashar Musyafir, S.Pd.,Gr., Mutmainnah, S.Sos, MAP., Alfa Patriana, S.Pd., Taslim, ST., Arman, SE., sebagai kawan dalam organisasi yang tiada hentinya memberikan semangat dan motivasi untuk terus maju dan berusaha.
12. Kakanda Riswal, S.Pd., Arwin, S.Pi, M.Si., Raja Batari Gau, M.Si sebagai kawan diskusi Peneliti yang tiada hentinya memberikan semangat dan motivasi untuk terus maju dan berusaha.
13. Kakanda Husain Jamaluddin, ST., Kakanda Ancy, Kakanda Udin, Kakanda Haerul, Kakanda Darwis, Kakanda Adhy, Kakanda Yudhi sebagai Kakanda Peneliti yang tiada hentinya memberikan semangat dan motivasi untuk terus maju dan berusaha baik dukungan moril maupun moral.
14. Ir. Irwansyah, ST dan Paramitha, Amd.Kep yang merupakan Kakak dari peneliti yang selalu berdo'a dan mendukung yang terbaik untuk peneliti.
15. Silvih, S.Pd yang merupakan Adinda dari peneliti yang selalu berdo'a yang terbaik untuk peneliti.

Ucapan terima kasih yang mendalam atas ilmu yang bermanfaat buat dosen-dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tempat peneliti bekerja. Dan tentunya teman-teman pascasarjana 2020 di semester genap yang senantiasa mendukung peneliti dalam pengerjaan tesis ini. Semoga tesis ini memberikan semangat dan pengaruh besar untuk peneliti. Diharapkan tesis ini bisa menambah kajian keilmuan dan acuan untuk penelitian selanjutnya.

Makassar, 5 Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

MUH. CHAERUL. *Strategi Komunikasi Lingkungan Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Mangrove di Dusun Tanroe Desa Bababinanga Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Hafied Cangara dan Andi Alimuddin Unde).

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi bentuk partisipasi masyarakat dan strategi komunikasi yang dijalankan pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode campuran. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni wawancara mendalam, kuesioner, observasi partisipan, dokumen, serta *focus group discussion*. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman dengan langkah-langkah pereduksian data, penyajian data, dan penyimpulan. Data dianalisis menggunakan *software* Smart-PLS dengan analisis persamaan struktural berbasis varian secara simultan sekaligus pengujian model struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat meliputi perencanaan program dilakukan oleh kesatuan pengelolaan hutan, terutama status lahan; kegiatan penyuluhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan; program rehabilitasi mangrove dilaksanakan oleh para penduduk Dusun Tanroe dan dari dusun tetangga; evaluasi keberhasilan program dilakukan oleh Dinas Perikanan dan tiga pilar bhabinkamtibmas; para nelayan setempat telah menikmati manfaat program, terutama dalam mengatasi abrasi laut; serta partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh kesatuan pengelolaan hutan dan anggota masyarakat Dusun Tanroe dengan FGD; strategi komunikasi pemerintah meliputi indikator-indikator, yaitu: komunikator adalah kesatuan pengelolaan hutan; pesan yang disampaikan adalah informasi tentang pentingnya mangrove; media informasi melalui himbauan pemerintah kepada masyarakat dan informasi langsung melalui ketua kelompok kepada anggota perihal pelaksanaan serta rapat pemerintah dan kelompok dengan tatap muka langsung; khalayak adalah para anggota masyarakat; faktor pendukung, yakni sosialisasi yang intensif, ketersediaan bibit mangrove, keterlibatan tokoh masyarakat, keterlibatan pemerintah, penggunaan terminologi teknis di bidang lingkungan; dan faktor penghambat, yakni pasang surut yang ekstrim dan perluasan tambak.

Kata kunci: strategi komunikasi lingkungan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi mangrove, Dusun Tanroe Desa Bababinanga, Kabupaten Pinrang



ABSTRACT

MUH. CHAERUL. *Environmental Communication Strategy Based on Community Participation in Mangrove Rehabilitation in Tanroe Hamlet, Bababinanga Village, Pinrang Regency* (supervised by Hafied Cangara and Andi Alimuddin Unde)

This research aims to evaluate the forms of community participation and communication strategies implemented by the government. The approach used was Mix Methods method. The data collection techniques used were in-depth interviews, questionnaires, participant observation, documents, and focus group discussions. Data analysis used Miles and Huberman method involving data reduction steps, data presentation, and conclusions. Data were analyzed using SmartPLS software with simultaneous variance-based structural equation analysis as well as structural model testing. The results of this research show that forms of community participation include program planning carried out by the forest management unit, especially land status, outreach activities, and delivery of implementation information. Mangrove rehabilitation program is carried out by residents of Tanroe Hamlet and neighboring Hamlets. Evaluation of the success of the program is carried out by the fisheries service and the three pillars of Bhabinkamtibmas. Local fishermen have enjoyed the benefits of the program, especially in overcoming sea abrasion, as well as participation in decision making by the Forest Management Unit and members of the Tanroe hamlet community with FGDs. The government's communication strategy includes indicators, i.e. communicator that is the Forest Management Unit. The message conveyed is information about the importance of mangroves. Information media through government appeals to the community and direct information through the group leader to members regarding implementation as well as face-to-face government and group meetings, and the audience is community members. Supporting factors consist of intensive outreach, availability of mangrove seeds, involvement of community leaders, government involvement, and the use of technical terminology in the environmental field, while inhibiting factors are extreme tides and pond expansion.

Key words: environmental communication strategy, community participation, mangrove rehabilitation, Tanroe Hamlet, Bababinanga Village, Pinrang Regency



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Konsep	11
1. Strategi Komunikasi	11
2. Rehabilitasi	14
3. Mangrove.....	14
4. Komunikasi Lingkungan	17
5. Komunikasi Kelompok	19
6. Partisipasi Masyarakat.....	20
B. Landasan Teori	32

1. Teori Peyadaran Masyarakat	32
2. Teori Advokasi dan Mobilisasi Masyarakat	36
3. Penetapan Strategi dan Analisis SWOT.....	43
C. Hasil Penelitian yang Relevan	45
D. Kerangka Pikir.....	50
E. Definisi Konseptual	51
F. Hipotesis	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	57
C. Sumber Data.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Teknik Analisis Data.....	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian	68
1. Pemerintah Desa Bababinanga	68
2. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	73
3. Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang	82
B. Ruang Lingkup Program	85
1. Bentuk Rehabilitasi mangrove	85
2. Program Adaptasi Masyarakat DAS Saddang	92
C. Inisiasi Praktek Model Perencanaan Komunikasi Advokasi	95
D. Alihfungsi lahan.....	104
E. Evaluasi bentuk Partisipasi masyarakat dalam program.....	110
F. Strategi komunikasi yang dijalankan Pemerintah	116

G. Analisis Faktor Pendukung dan Hambatan Pemerintah.....	122
1. Uji Outer Model.....	132
2. Uji Model Structural (<i>Inner Model</i>)	140
3. Pengaruh Langsung (<i>Direct Effect</i>)	142

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	146
B. Saran	147

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pergeseran Konseptual yang diperlukan.....	30
Tabel 2. Informan Penelitian	60
Tabel 3. Daftar Sampel yang dijadikan Responden	61
Tabel 4. Pengukuran Skala Likert.....	67
Tabel 5. Daftar Kejadian	69
Tabel 6. Jumlah Penduduk	70
Tabel 7. Prasarana Desa	72
Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan	128
Tabel 9. Nilai Loading Factor Indikator.....	133
Tabel 10. Nilai Loading Factor Indikator.....	135
Tabel 11. Nilai Cross Loading	136
Tabel 12. Nilai Fornell-Larcker Criterion.....	137
Tabel 13. Nilai Composite Reliability	138
Tabel 14. Nilai Cronbach's Alpha	139
Tabel 15. Nilai Average Variance Extracted (AVE)	139
Tabel 16. Nilai R-Square.....	140
Tabel 17. Nilai Koefisien, Standard Error dan T-Statistics.....	141
Tabel 18. Pengaruh Tidak Langsung (<i>Indirect Effects</i>)	143
Tabel 19. Rekapitulasi Hasil Kuesioner.....	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kuadran Tipe Proses Adopsi.....	33
Gambar 2. Model Perencanaan Komunikasi untuk Advokasi.....	38
Gambar 3. Model Analisis SWOT	44
Gambar 4. Kerangka Pikir.....	51
Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian.....	57
Gambar 6. Desain Penelitian	67
Gambar 7. Struktur Organisasi Desa Bababinanga	73
Gambar 8. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan UPT KPH.....	82
Gambar 9. Struktur Organisasi Dinas Perikanan	83
Gambar 10. Rencana Pola Tanam	88
Gambar 11. Inisiasi Praktek Model Perencanaan Komunikasi.....	95
Gambar 12. Brainstorming Kasus Penebangan Mangrove	108
Gambar 13. Model PLS Algorithm I	132
Gambar 14. Model PLS Algorithm II	134
Gambar 15. Uji Bootstrapping.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu lingkungan di pesisir yang menjadi perhatian karena eksistensinya yang penting, namun kondisi lingkungan di pesisir khususnya hutan mangrove semakin kritis. Ekosistem hutan mangrove merupakan sumberdaya alami yang memiliki fungsi dan manfaat penting dalam mendukung kehidupan manusia di pesisir baik fungsi secara ekologis maupun fungsi secara sosial ekonomi. Akan tetapi karena tindakan manusia yang merusak hutan mangrove di pesisir, sehingga semestinya dapat bermanfaat untuk manusia, berubah menjadi rusak. Baik itu diakibatkan eksploitasi hutan mangrove menjadi lahan tambak maupun kerusakan akibat pembabatan mangrove sehingga kelestarian lingkungan tidak terjaga.

Indonesia adalah Negara yang mempunyai ekosistem hutan mangrove terluas di dunia, diikuti Brazil, Australia, Nigeria dan Mexico. Indonesia memiliki salah satu wilayah hutan mangrove terluas di dunia sekitar 3 Juta Ha hutan mangrove tumbuh di sepanjang 95.000 kilometer pesisir Indonesia. Jumlah ini mewakili 23% dari keseluruhan ekosistem mangrove dunia (Giri et al.,2011).

Kondisi ekosistem mangrove dengan status kritis saat ini mencapai 637.624,31 Ha atau setara dengan 19,26% dari total ekosistem mangrove

di Indonesia (Rahmanto, 2020). Rahmanto juga mengungkapkan sejumlah data, Indonesia menjadi negeri dengan laju deforestasi ekosistem mangrove tertinggi di dunia. Menurut *Center for International Forestry Research* (CIFOR) saat ini ekosistem mangrove Indonesia mengalami tekanan dengan ancaman laju degradasi yang tinggi mencapai 52.000 Ha/tahun. Dalam tiga dekade terakhir, Indonesia kehilangan 40% mangrove (FAO, 2007), Artinya, Indonesia memiliki kecepatan kerusakan mangrove terbesar di dunia (Campbell & Brown, 2015).

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan masyarakat pesisir. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia makanan bagi biota laut, penahan abrasi pantai, penahan gelombang pasang dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, hutan mangrove juga bisa berfungsi untuk menyediakan kebutuhan pangan penduduk di sekitarnya. Tumbuhan yang hidup di hutan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Umumnya mangrove mempunyai sistem perakaran yang menonjol yang disebut akar nafas (*pneumatofor*). Sistem perakaran ini merupakan suatu cara adaptasi terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen atau bahkan *anaerob*. Mangrove tersebar di seluruh lautan tropik dan subtropik, tumbuh hanya pada pantai yang terlindung dari gerakan gelombang; bila keadaan pantai sebaliknya, benih tidak mampu tumbuh dengan sempurna dan menancapkan akarnya (Riwayati, 2014).

Ekosistem hutan mangrove adalah suatu sistem ekologi yang terdiri dari komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur (Bengen, 2000). Ekosistem mangrove mempunyai banyak fungsi, diantaranya sebagai tempat tumbuhan dan hewan berinteraksi secara berkesinambungan. Banyak jenis hewan yang menggunakan ekosistem mangrove untuk mencari makan dan berlindung. Kemudian manfaat lain dari mangrove adalah sebagai stabilisator tepian sungai dan pesisir seperti pengendalian erosi pantai, menjaga stabilitas sedimen dan bahkan turut berperan serta dalam menambah perluasan daerah daratan. Serta manfaat lainnya yaitu perlindungan garis pantai dan berperan penting memfungsikan ekosistem sekitarnya, termasuk tanah-tanah basah pesisir, terumbu karang, dan lamun (Ghufran H.K, 2012:52).

Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang memiliki pesisir dimana menurut hasil landsat-8 tahun 2021 luas mangrove sekitar 18.995,8 Ha (litbangjirap mangrove, 2021). Berdasarkan data *Clark Labs*, luasan konversi mangrove ke tambak dari tahun 1999 hingga tahun 2018 seluas 9.689 Ha. Bisa dibayangkan berapa pertambahan konversi mangrove ke tambak pada 2021 ini, dimana pada 2020-2021 sudah terdapat beberapa kasus kerusakan mangrove, dimulai dari Lantebung Makassar, Bonto Bahari Maros, Tekolabbua Pangkep, hingga Tanroe Pinrang, belum dihitung kasus-kasus kerusakan mangrove lain yang tidak terdata dan dibiarkan begitu saja (<http://matakita.co>).

Pengelolaan hutan mangrove di Sulawesi Selatan masih sering mengalami kendala. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelibatan masyarakat lokal. Hasil penelitian di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan yang dilakukan Amal (2008) tentang model partisipasi masyarakat dalam menginginkan mereka dilibatkan mulai dari tahap pelestarian, karena merekalah yang tahu persis kondisinya tapi kenyataannya mereka kadang tidak dilibatkan, sehingga program yang direncanakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain menemui kegagalan (Amal dan Baharuddin, 2016).

Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki garis pantai 93 km dengan luas mangrove sekitar 50.7 Ha (0,03%) (infopinrang.com). Dusun Tanroe, Kecamatan Duampanua memiliki kawasan hutan mangrove seluas kurang lebih 25.7 Ha. Kawasan hutan mangrove ini dibangun oleh beberapa gabungan komunitas dan warga setempat yang peduli akan lingkungan. Namun, karena kawasan tersebut kurang terekspos membuat banyak orang yang tidak mengetahui kawasan tersebut. Kawasan tersebut bisa dibilang cukup indah, karena mangrovenya yang tumbuh dengan subur. Selain itu masyarakat sekitar juga memanfaatkan kawasan tersebut untuk menangkap kepiting dan kerang (Jayanthi, 2020).

Berdasarkan data WWF-Indonesia bahwa 50% luasan mangrove yang sebelumnya dikonversi menjadi tambak sebelum Mei 1999 (www.wwf.id). Kawasan mangrove di Kabupaten Pinrang dibabat habis

untuk dialih fungsi sebagai tambak. Pihak Pemerintah Kabupaten Pinrang menyatakan praktik itu sudah berlangsung lama dan tidak bisa berbuat apa-apa karena wewenang pengelolaan pesisir ada di pemerintah provinsi. Di Kawasan alih fungsi tersebut telah ditanami 300 pohon, yang ditanam sejak 4 Agustus 2019-26 Juli 2021, dengan tingkat *survival rate*/daya hidup sampai 70-80%. Aktivis menilai Pemkab Pinrang tidak bisa melepas tanggung jawab begitu saja, karena persoalan pesisir bukan sekadar soal kewenangan, apalagi jika sudah terjadi kerusakan yang berpotensi merugikan publik, maka pihak kabupaten harus mengambil alih (mongabay.co.id).

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pinrang tahun 2012-2023. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan bahwa perlindungan ekosistem/tumbuhan mangrove terdapat pada poin Kawasan Perlindungan setempat, diantaranya Kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai. Selain itu, pada RTRW terdapat ketentuan untuk Kawasan Lindung lainnya, dijelaskan pada Pasal 29 (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas kawasan terumbu karang dan kawasan hutan mangrove serta tanaman padang lamun. Pada pasal 52 Perda RTRW Pinrang, terdapat pula ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi; b. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir

tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*); c. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional; dan d. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (mongabay.co.id).

Komunikasi lingkungan adalah sarana pragmatis dan konstitutif untuk memberikan pemahaman mengenai lingkungan kepada masyarakat, seperti halnya hubungan kita dengan alam semesta, ini merupakan sebuah media simbolik yang digunakan untuk menciptakan masalah lingkungan dan negosiasi perbedaan respon terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi. Dengan kata lain komunikasi lingkungan digunakan untuk menciptakan kesepaham mengenai permasalahan lingkungan (Cox, 2010:10).

Pada dasarnya komunikasi lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan termasuk hutan dan polanya bersifat dialogis yang lebih banyak terjadi pada komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Partisipasi masyarakat itu salah satunya dapat ditumbuhkan melalui komunikasi lingkungan karena mulai dari unsur, media dan prosesnya bertujuan untuk

menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan, atau dengan kata lain komunikasi lingkungan merupakan media pragmatis dan konstruktif dalam menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam turut mengelola lingkungan.

Komunikasi lingkungan sedapat mungkin menerapkan praktik-praktik komunikasi yang bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan juga dari atas ke bawah (*top-down*). Semua praktik komunikasi seperti itu bertujuan untuk mencapai saling pengertian. Jika hal ini diterapkan untuk agenda lingkungan, maka tujuan saling pengertian ini sama kedudukannya atau setara dengan kesadaran lingkungan masyarakat.

Komunikasi lingkungan harus mempraktikkan jurnalisme pembangunan, penyiaran komunitas, komunikasi pendidikan dan pemasaran sosial. Serta menekankan pada proses enkulturasi dengan penggunaan komunikasi adat (*Indigenous Communication*), media populer, penyadaran, dan mobilisasi sosial (Flor dan Cangara, 2018:27).

Oleh karena itu diperlukan peran komunikasi lingkungan dalam menjawab permasalahan kawasan alih fungsi lahan dan kerusakan lahan mangrove yang berpotensi merugikan masyarakat, maka peran komunikasi dalam mendorong kesadaran masyarakat agar mereka menyadari dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan untuk mengelola serta melestarikan alam sekitar dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tentang: **“Strategi Komunikasi Lingkungan berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Mangrove Di Dusun Tanroe Desa Bababinanga Kabupaten Pinrang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program rehabilitasi mangrove sebagai upaya pemeliharaan ekosistem lingkungan di Dusun Tanroe Desa Bababinanga?
2. Bagaimana strategi komunikasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang (Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sawitto dan Dinas Perikanan) dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap program rehabilitasi mangrove sebagai upaya pemeliharaan ekosistem lingkungan di Dusun Tanroe Desa Bababinanga?
3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap program rehabilitasi mangrove di Dusun Tanroe Desa Bababinanga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program rehabilitasi mangrove sebagai upaya pemeliharaan ekosistem lingkungan di Dusun Tanroe Desa Bababinanga.
2. Untuk menyusun strategi komunikasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang (Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sawitto dan Dinas Perikanan) dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap program rehabilitasi mangrove sebagai upaya pemeliharaan ekosistem lingkungan di Dusun Tanroe Desa Bababinanga.
3. Untuk menganalisis Faktor yang menjadi pendukung maupun hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap program rehabilitasi mangrove di Dusun Tanroe Desa Bababinanga.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap ada beberapa manfaat yang dihasilkan baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam menambah pengetahuan dan bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang bagi studi Strategi Komunikasi Lingkungan berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi

Mangrove di Dusun Tanroe Desa Bababinanga Kabupaten Pinrang.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi, terutama mengenai kajian strategi komunikasi lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholder yang ingin mengetahui lebih jauh tentang strategi komunikasi lingkungan berbasis partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi mangrove di Dusun Tanroe Desa Bababinanga Kabupaten Pinrang. Sebagai bahan masukan dan acuan bagi peneliti lain yang tertarik dalam bidang yang sama dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Strategi Komunikasi

a. Komunikasi

Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin *Communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa Latin *Communico* yang artinya membagi Cherry.

Everett M. Roger mengatakan bahwa, komunikasi adalah suatu proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Sedangkan Carl I. Hovland mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan) (Mulyana, 2010:68).

Richard West & Lynn H. Turner mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Adanya komunikasi juga dapat menimbulkan sebuah interaksi antara dua orang atau lebih, sebagaimana dikatakan bahwa David Berlo mendefinisikan komunikasi sebagai instrumen dari interaksi sosial

yang berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain, serta mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat (Cangara, 2019:3). Dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Definisi ini cukup menggambarkan realitas yang lengkap dan tidak dengan searah (Yasir, 2011:5). Definisi tersebut menguraikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengertian komunikasi:

- 1) Komunikasi sebagai proses (*communication as process*)
 - 2) Komunikasi sebagai ciri khas manusia yang unik (*communication as uniquely human*)
 - 3) Komunikasi sebagai aktivitas kolektif (*communication as collective activity*)
 - 4) Komunikasi sebagai usaha kreatif (*communication as creative endeavor*)
 - 5) Komunikasi sebagai pengatur (*communication as regulatory*)
- (Yasir dalam Hadikurnia, 2019)

Implikasi penggunaan definisi diatas memunculkan beberapa hal penting. *Pertama*, melalui komunikasi masing-masing manusia saling menciptakan realitas dunia mereka. Dengan kata lain, realitas adalah produk komunikasi. *Kedua*, Manusia memperkenalkan apa yang telah mereka ciptakan melalui komunikasi untuk mengontrol mereka. *Ketiga*, Komunikasi selalu terjadi dalam konteks budaya. *Keempat*, Komunikasi membutuhkan kerjasama, maksudnya apa yang

penting dalam komunikasi antarperson adalah apa yang dilakukan orang ketika mereka bersama, bukan pada waktu mereka berpisah (Yasir, 2011:6).

b. Pengertian Strategi Komunikasi

Kata Strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “*stratos*” yang artinya tentara dan kata “*agein*” yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata *strategos* yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jenderal (*The Art of General*), atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Dalam strategi ada prinsip yang harus dicamkan, yakni “Tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh musuh, sebelum mereka mengerjakannya” (Cangara, 2017:64).

Rogers memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton membuat definisi dengan menyatakan “Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal (Cangara, 2017:64).

2. Rehabilitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Rehabilitasi artinya Pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan berdasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41/1999) menyatakan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan: (1) reboisasi, (2) penghijauan, (3) pemeliharaan, (4) pengayaan tanaman dan (5) penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

3. Mangrove

a. Pengertian Mangrove

Definisi mangrove sendiri dijelaskan oleh beberapa ahli: Menurut MacNae (Khazali, 2012:1), menyebutkan kata “mangrove” merupakan perpaduan antara bahasa Portugis *mangue* dan bahasa inggris *grove*. MacNae kemudian menggunakan istilah “mangal” apabila berkaitan dengan komunitas hutan dan mangrove untuk individu tumbuhan (Khazali, 2012:1).

Mangrove sebagai komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur (Bengen, 2000:79). Mangrove adalah pohon yang sudah beradaptasi sedemikian sehingga akan mampu untuk hidup di lingkungan berkadar

garam tinggi seperti lingkungan laut. Sedangkan hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis yang didominasi beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur (Nontji, 2005:106).

Pohon-pohon mangrove adalah halofit, artinya bahwa mangrove ini tahan akan tanah yang mengandung garam dan genangan air laut. Ada juga mangrove tumbuh di tempat lebih tinggi, sehingga akan mengalami masa tanpa di genangan air laut yang agak panjang. Namun beberapa pohon mangrove dapat dijumpai di tepi air dimana pohon itu tumbuh adalah air tawar, tetapi pada dasar sungai terdapat seiris air asin Anwar (dalam Rusdianti, 2012).

b. Manfaat dan Fungsi Hutan Mangrove

Ekosistem hutan mangrove mempunyai manfaat penting dalam mendukung kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Dahuri (dalam Rusdianti, 2012) menyatakan bahwa secara garis besar ekosistem hutan mangrove mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial ekonomi.

c. Fungsi Ekologis Hutan Mangrove

Mangrove merupakan salah satu ekosistem yang mempunyai peranan penting dalam upaya pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya pesisir dan laut, yang memiliki fungsi penting sebagai

penyambung ekologi darat dan laut, serta gejala alam yang ditimbulkan oleh perairan, seperti abrasi, gelombang dan badai. Disamping itu juga merupakan penyangga kehidupan sumberdaya ikan, karena ekosistem mangrove merupakan daerah pemijahan (*spawning ground*) daerah asuhan (*nursery ground*) dan daerah mencari makan (*feeding ground*) (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2009).

Menurut Riwayati (2014) Manfaat dan fungsi hutan mangrove dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Manfaat/Fungsi Fisik

- 1) Menjaga agar garis pantai tetap stabil.
- 2) Melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi.
- 3) Menahan badai/angin kencang dari laut.
- 4) Menahan hasil proses penimbunan lumpur, sehingga memungkinkan terbentuknya lahan baru.
- 5) Menjadi wilayah penyangga, serta berfungsi menyaring air laut menjadi air daratan yang tawar.
- 6) Mengolah limbah beracun, penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida.

b. Manfaat/Fungsi Biologis

- 1) Menghasilkan bahan pelapukan menjadi sumber makanan penting bagi plankton, sehingga penting pula bagi keberlanjutan rantai makanan.
- 2) Tempat memijah dan berkembang biaknya ikan-ikan, kerang, kepiting dan udang.
- 3) Tempat berlindung, bersarang dan berkembang biak dari burung dan satwa lain.
- 4) Sumber plasma nutfah dan sumber genetik.
- 5) Merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota.

c. Manfaat/Fungsi Ekonomis

- 1) Penghasil kayu: bakar, arang, bahan bangunan
- 2) Penghasil bahan baku industri: pulp, tannin, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, kosmetik, dll.
- 3) Penghasil bibit ikan, nener, kerang, kepiting, bandeng melalui pola tambak *silvofishery*.
- 4) Tempat wisata, penelitian dan Pendidikan

4. Komunikasi Lingkungan

Cox dalam tulisannya "*Environmental Communication and Public Sphere*" (2010:20), menyatakan bahwa komunikasi lingkungan adalah sarana konstitutif dan pragmatis bagi pemahaman manusia dengan lingkungan serta hubungan manusia dengan alam. Hal ini

adalah media simbolis yang digunakan dalam menegosiasikan respon yang berbeda dalam masyarakat.

Cox (2010:20-21) juga menyatakan bahwa komunikasi lingkungan meliputi dua fungsi utama yaitu, pragmatis dan konstitutif. Secara pragmatis ini berkaitan dengan pendidikan, kewaspadaan, menakutkan, memobilisasi, dan membantu manusia mengatasi masalah-masalah lingkungan. Sedangkan dalam pemahaman konstitutif, meliputi aspek mengatur, menyusun, merepresentasikan alam dan masalah-masalah lingkungan itu sendiri sebagai subjek bagi pemahaman manusia. Melalui kerangka pemahaman ini, komunikasi lingkungan membawa pada pemahaman bahwa alam seperti hutan atau sungai sebagai ancaman ataupun sebagai sahabat, menghormati sumber daya alam apakah sistem pendukung vital bagi kehidupan, atau bisa juga sebagai penakluk ataupun sebagai sahabat yang baik (Yenrizal, 2015:10).

Komunikasi lingkungan sedapat mungkin menerapkan praktik-praktik komunikasi yang bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan juga dari atas ke bawah (*top-down*). Semua praktik komunikasi seperti itu bertujuan untuk mencapai saling pengertian. Jika hal ini diterapkan untuk agenda lingkungan, maka tujuan saling pengertian ini sama kedudukannya atau setara dengan kesadaran lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi lingkungan harus mempraktekkan jurnalisme pembangunan, penyiaran komunitas, komunikasi

pendidikan dan pemasaran sosial. Serta menekankan pada proses enkulturasi dengan penggunaan komunikasi adat (*Indigenous Communication*), media populer, penyadaran, dan mobilisasi sosial (Flor dan Cangara, 2018:27).

5. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua orang. Apabila jumlah orang dalam kelompok itu sedikit yang berarti kelompok itu kecil, komunikasi yang berlangsung disebut komunikasi kelompok kecil. Namun apabila jumlahnya banyak berarti kelompoknya dinamakan komunikasi kelompok besar.

Pengertian komunikasi kelompok juga dinyatakan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Effendy dalam Hadikurnia, 2019). Pada dasarnya komunikasi kelompok mempelajari pola-pola interaksi antar individu dengan titik berat tertentu, misalnya pengambilan keputusan (Mulyana dalam Hadikurnia, 2019). Hal ini bisa terjadi karena adanya keyakinan bahwa pengambilan keputusan pribadi berbeda dengan pengambilan keputusan yang harus dibuat secara bersama-sama dalam suatu kelompok Pawito (dalam Hadikurnia, 2019).

6. Partisipasi Masyarakat

Freire yang kemudian diikuti oleh Luis Ramiro Beltran dan Juan Diaz Bordenave, melahirkan konsepsi Komunikasi Pembangunan Partisipatif yang berbasis pada manusia. Mereka melihat bahwa mengubah perilaku masyarakat tidak bisa berubah jika ia melakukannya dengan kerelaan dan keikhlasan tanpa paksaan atau persuasi perubahan ini. Perubahan tidak bisa dilepaskan dengan peran kelembagaan sosial, jaringan dan kekuatan-kekuatan sosial budaya yang ada dalam masyarakat itu sendiri, termasuk faktor-faktor non perilaku, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. Ini dimaksudkan sebagai bagian dari pandangan luas yang mencakup pendekatan ekologis.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mefalopulos (dalam Cangara, 2020:402) telah mengonfirmasi bahwa partisipasi tidak hanya digunakan dalam cara yang ambigu dan sering tidak konsisten, tetapi juga dapat dikonseptualisasikan dan diterapkan dengan cara yang berbeda dalam proyek atau program yang sama.

Terminologi partisipasi telah digunakan di masa lalu oleh sejumlah sarjana untuk menekankan bahwa pendekatan komunikasi partisipatif berbeda dengan pendekatan difusi yang lebih tradisional. Pendekatan serupa digunakan, seperti komunikasi partisipatif untuk pembangunan, adalah pendekatan serupa yang digunakan untuk perubahan sosial. Komunikasi partisipatif menurut Flor (dalam

Cangara, 2020:403) merupakan hasil pergeseran dari paradigma dominan *top-down* ke pengembangan diri dimana penduduk desa dan kaum miskin kota adalah pemangku kepentingan utama. Kemandirian dan membangun sumber daya lokal juga ditekankan dalam proses.

Definisi yang lengkap antara lain dikemukakan oleh Bessette (2004) peraih Doktor pendidikan dari Montreal University Kanada dalam Hadiyanto (2008) adalah sebagai berikut.

Komunikasi pembangunan partisipatif adalah suatu aktivitas yang direncanakan dan didasarkan pada proses-proses partisipatif di satu sisi, dan pemanfaatan media komunikasi dan komunikasi tatap muka di sisi lain, dengan tujuan untuk memfasilitasi dialog di antara pemangku kepentingan yang berbeda, yang berkisar pada rumusan masalah atau sasaran pembangunan bersama, mengembangkan dan melaksanakan atau menjabarkan seperangkat aktivitas yang memberi kontribusi untuk mencari solusi yang didukung bersama. (Cangara, 2020:404).

Proses partisipatif yang dimaksud adalah adanya partisipasi komunitas, yakni adanya keterlibatan aktif kelompok komunitas, bersama-sama pemangku kepentingan lainnya dan beberapa agen pembangunan serta peneliti yang bekerja dengan komunitas serta para pengambil keputusan. Secara umum yang dimaksud dengan pemangku kepentingan antara lain anggota komunitas (masyarakat),

kelompok-kelompok masyarakat yang aktif, aparat pemerintah lokal atau regional, LSM, petugas teknis pemerintah atau lembaga lainnya yang bekerja di tingkat komunitas, para pembuat kebijakan yang semestinya terlibat dalam upaya pembangunan yang berlangsung.

Uphoff dalam (Cangara, 2020:404) membagi partisipasi dalam empat bentuk berikut:

1. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Disini setiap anggota masyarakat diminta untuk berperan dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan disini dilakukan dalam bentuk tindakan atau aksi, bukan saja dalam bantuan tenaga dan fisik, tetapi juga dalam bentuk dana, pikiran, dan sumber daya lainnya yang bisa dikerahkan dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

2. Partisipasi dalam evaluasi

Di sini warga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, dan juga mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, apakah memberi manfaat dan sudah sesuai dengan kebutuhan orang banyak. Warga diberi kesempatan untuk mengkritisi sebagai bentuk partisipasi langsung agar proses pembangunan yang dijalankan berada dalam koridor perencanaan.

3. Partisipasi dalam menarik manfaat

Di sini warga tidak saja diminta untuk berperan dan mengevaluasi jalannya pembangunan, tetapi juga diberi kewenangan untuk menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri. Hal ini dikarenakan pembangunan memakai slogan dari rakyat untuk rakyat. Jadi, hasil pembangunan harus bisa dinikmati oleh warga, dan bukannya dikuras untuk kepentingan orang lain. Misalnya, pembangunan sekolah bisa memberi kesempatan anak-anak menikmati pendidikan, pembuatan pelelangan ikan dan pasar memberi kesempatan untuk warga bisa dengan leluasa pergi menjual hasil tangkapannya, dan lain-lain.

4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Di sini warga diberi kesempatan untuk ikut berbicara, berdiskusi, dan bertukar pikiran untuk pengambilan keputusan terhadap suatu program yang akan dilaksanakan. Mekanisme pengambilan keputusan di sini menunjukkan adanya demokratisasi yang berjalan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Proses ini juga menempatkan warga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari komunitas yang harus dihargai pikirannya, sumbang saran sebagai bentuk partisipasi. Dalam hal ini pengambilan keputusan, McKee dalam Cangara (2020) mengkritik bahwa inisiatif partisipatif yang tidak melibatkan komunitas dan individu non pakar dalam pengambilan keputusan adalah partisipasi palsu.

Dari empat pilar partisipasi ini, sebagian besar pekerja sosial di lapangan akan setuju bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk yang paling penting untuk dipromosikan. Ini memberi orang kendali atas kehidupan dan lingkungan mereka. Pada saat yang sama orang-orang memperoleh keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh kepemilikan penuh atas proyek. Ini merupakan dua elemen penting yang akan berkontribusi dalam mengamankan pembangunan berkelanjutan komunitas mereka.

Tiga bentuk partisipasi lainnya, yaitu partisipasi dalam implementasi, evaluasi, dan manfaat, juga mendapat kritik sebagai partisipasi palsu jika komunitas tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan sebagai hal yang sangat fundamental dan diperlukan untuk pendekatan tersebut. Mereka merasa bahwa orang-orang dimanipulasi melalui ketiga bentuk partisipasi semu ini untuk menerima rencana yang dibuat oleh orang-orang yang lebih kuat.

Oleh sebab itu Pretty dan Cornwall melihat praktik partisipasi di lapangan atas tujuh tipe, yakni sebagai berikut:

1. Partisipasi manipulatif (pilihan bersama)

Partisipasi masyarakat hanyalah sebuah kepura-puraan. Perwakilan rakyat di dewan resmi yang tidak dipilih dan tidak memiliki kekuatan.

2. Partisipasi pasif (kepatuhan)

Masyarakat berpartisipasi dengan diberi tahu apa yang telah diputuskan atau sudah terjadi. Penyampaian pengumuman sepihak oleh manajemen proyek tanpa mendengarkan tanggapan orang. Informasi ini hanya dimiliki oleh para profesional eksternal.

3. Partisipasi melalui konsultasi

Masyarakat berpartisipasi dengan berkonsultasi atau dengan menjawab pertanyaan. Agen eksternal mendefinisikan masalah dan proses pengumpulan informasi, dan juga mengendalikan analisis. Proses konsultatif semacam itu tidak mengakui bagian apa pun dalam pengambilan keputusan, dan para profesional tidak berkewajiban mengambil pandangan orang lain.

4. Partisipasi untuk insentif materiil

Masyarakat berpartisipasi dengan menyumbang sumber daya, seperti tenaga kerja, sebagai imbalan atas insentif materiil (misalnya makanan, uang tunai). Sangat umum untuk melihat partisipasi yang disebut ini, namun orang tidak memiliki kepentingan dalam memperpanjang praktik ketika insentif berakhir.

5. Partisipasi fungsional (kerja sama)

Partisipasi masyarakat dilihat oleh lembaga eksternal sebagai sarana untuk mencapai tujuan proyek. Orang berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk memenuhi tujuan proyek yang telah ditentukan; mereka mungkin terlibat dalam pengambilan keputusan,

tetapi hanya setelah keputusan besar telah dibuat oleh agen eksternal.

6. Partisipasi interaktif (*co-learning*)

Orang-orang berpartisipasi dalam analisis bersama, pengembangan rencana aksi, dan pembentukan atau penguatan institusi lokal. Partisipasi dipandang sebagai hak, bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan proyek. Proses ini memakai pendekatan interdisipliner yang mencari berbagai perspektif dan memanfaatkan proses pembelajaran sistemik dan terstruktur. Ketika kelompok mengambil kendali atas keputusan lokal dan menentukan bagaimana sumber daya yang tersedia digunakan sehingga mereka memiliki kepentingan dalam mempertahankan struktur atau praktik.

7. *Self mobilization* (aksi kolektif)

Orang berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara independen dari lembaga eksternal untuk mengubah sistem. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga eksternal untuk sumber daya dan saran teknis yang mereka butuhkan, tetapi mempertahankan kontrol atas bagaimana sumber daya digunakan. Mobilisasi diri dapat menyebar jika pemerintah dan LSM menyediakan kerangka kerja dukungan yang memungkinkan. Mobilisasi yang diprakarsai sendiri semacam itu dapat atau tidak menantang distribusi kekayaan dan kekuasaan yang ada.

Metode Partisipatif

Ada beberapa metode telah digunakan oleh kelompok-kelompok yang bekerja di masyarakat, baik di tingkat regional maupun di subregional, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bersiap untuk merencanakan tindakan

Komunikasi memainkan peran penting pada tahap ini. Masyarakat perlu didorong dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan.

b. Merencanakan apa yang harus dilakukan

Pada waktu yang tepat, anggota komunitas diundang untuk bercerita dan menyarankan apa yang diperlukan masyarakat. Metode ini cukup efektif dengan sejumlah alasan. Di Filipina, metode ini dikenal dengan nama CIPS atau Sistem Informasi Perencanaan Masyarakat. Metode ini didasarkan atas penelitian ilmiah, di mana awalnya banyak orang menganggap asing dan tidak berguna bagi masyarakat pedesaan. Dalam metode ini penduduk desa yang telah mendengar tentang CIPS mengundang universitas tempat CIPS dikembangkan, agar mengirim pelatih untuk bekerja sama dengan masyarakat. Ini dimulai dengan mengadakan kursus singkat tentang proses penelitian.

c. Aksi pendukung

Agar program bisa sesuai dengan tujuan komunikasi partisipatif, semua pelatihan harus fokus pada komunikasi sebagai

instrumen untuk memberdayakan masyarakat alih-alih sebagai kendaraan memindahkan informasi. Di sini komunikasi memfasilitasi dengan tujuan:

- 1) Menciptakan pemahaman yang jelas tentang tindakan yang diusulkan;
- 2) Mengumpulkan umpan balik untuk memastikan apakah tindakan dapat diterima dan di dukung oleh semua; dan jika tidak menemukan alternatif yang disukai;
- 3) Mengomunikasikan tindakan yang telah diselesaikan;
- 4) Memberikan dukungan dan publisitas yang sesuai saat tindakan sedang dilaksanakan;
- 5) Memberi tahu anggota tentang kemajuan dan mengumpulkan reaksi mereka;
- 6) Melaporkan dampak tindakan;
- 7) Mengumpulkan dan berbagi reaksi anggota terhadap tindakan yang diambil;
- 8) Merencanakan tindakan selanjutnya.

d. Iterasi prosesnya

Tindakan harus diambil dalam serangkaian langkah, mulai dengan yang paling mendesak atau paling mudah dikelola, kemudian beralih ke yang lain setelah selesai. Proses iterasi (berulang-ulang) ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar. Iterasi juga memfasilitasi peningkatan derajat partisipasi di antara anggota

masyarakat ketika mereka belajar untuk bekerja satu sama lain, dan mengembangkan rasa percaya diri dan loyalitas satu sama lain.

e. Bekerja di tingkat regional

Komunikator yang bekerja dengan media telah mengembangkan metode komunikasi partisipatif mereka sendiri. Tidak seperti proyek-proyek LSM berbasis desa di mana jumlah mitra terbatas. Mereka harus menyadari partisipasi orang-orang dengan melacak respon orang-orang terhadap pekerjaan mereka, atau dengan berbagi pengawasan dengan media terhadap orang-orang tersebut.

f. Penelitian umpan balik

Penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan mereka dijadikan sebagai laporan kepada pemangku kepentingan, dan juga disediakan forum membicarakan masalah yang mereka hadapi.

g. Orang yang bertanggung jawab

Tempatkan orang-orang yang bertanggung jawab atas keputusan program yang akan dilaksanakan. Mereka memutuskan apa yang akan dilakukan.

Campbell dalam Amal dan Baharuddin (2016), mempunyai pemikiran lain yaitu berbasis masyarakat adalah lebih pada proses perubahan sikap dan orientasi, mekanisme institusional dan administratif dan metoda manajemen dari pengelolaan sumberdaya

hutan. Tahapan yang diusulkan adalah 20 (dua puluh) langkah pergeseran yang diperlukan dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat (kehutanan masyarakat), yaitu:

Tabel 1. Pergeseran Konseptual yang diperlukan

No	Dari	Menuju
A	Sikap dan Orientasi	
1	Pengendalian	Dukungan/fasilitas
2	Penerima Manfaat	Mitra
3	Pengguna	Pengelola
4	Pembuatan keputusan unilateral	Partisipatif
5	Orientasi penerimaan	Orientasi sumber daya
6	Keuntungan nasional	Orientasi keadilan local
7	Diarahkan oleh rencana	Proses belajar/evolusi
B	Institusional dan Administratif	
8	Sentralisasi	Desentralisasi
9	Manajemen (perencanaan, pelaksanaan, monitoring) oleh Pemerintah	Kemitraan

10	<i>Top down</i>	Partisipatif/negosiatif
11	Orientasi target	Orientasi proses
12	Anggaran kaku untuk rencana kerja besar	Anggaran yang fleksibel dengan rencana mikro
13	Aturan-aturan untuk menghukum	Penyelesaian konflik
C	Metode Manajemen	
14	Kaku	Fleksibel
15	Tujuan tunggal	Tujuan ganda/beragam
16	Keseragaman	Keanekaragaman
17	Produk tunggal	Produk beragam
18	Menu manajemen yang tetap dengan aturan silvikultur	Beragam pilihan silvikultur untuk spesifik lokasi
19	Tanaman	Regenerasi alam
20	Tenaga kerja/buruh/pengumpul	Manager/pelaksana/pemasar

(Amal, dkk, 2016).

B. Landasan Teori

1. Teori Penyadaran Masyarakat

Menurut Kotler dan Roberto dalam Cangara (2017:191) Ada empat tipe penerimaan ide atau gagasan untuk perubahan, yakni:

- a. *Learn - feel - do adoption* (belajar – merasakan – melakukan)
- b. *Do - feel - Learn adoption* (melakukan – merasakan – belajar)
- c. *Learn - do - feel adoption* (mempelajari – melakukan - merasakan)
- d. *Multipath adoption* (adopsi dengan multi cara).

Penerimaan gagasan yang diawali dengan pembelajaran, lalu merasa, dan terakhir ditindaklanjuti (*learn – feel – do adoption*), dapat melibatkan partisipasi target adopter yang tinggi, karena didasari atas pengetahuan dan kesadaran awal. Dalam konteks penyuluhan (*extension education*) tipe ini dipandang sebagai model klasik yang selalu diupayakan membawa khalayak untuk bisa memahami apa yang diterimanya. Dengan cara itu khalayak bisa lebih lestari dalam menerima inovasi.

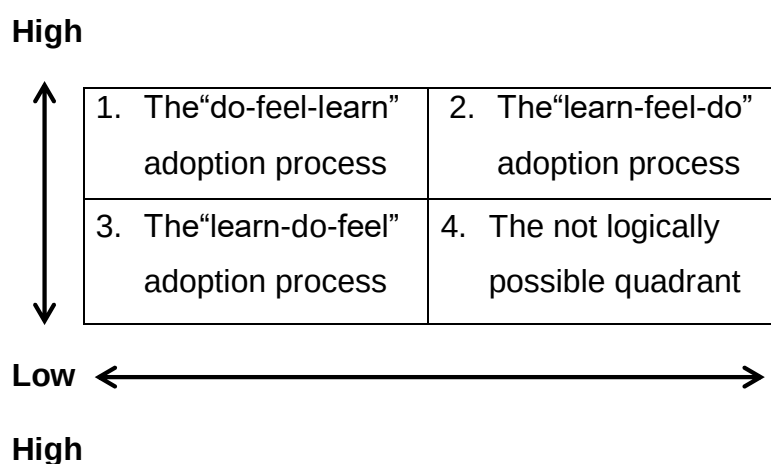
Berbeda halnya dengan penerimaan adopsi yang diawali dengan tindakan, lalu dirasakan dan terakhir pada tingkat pembelajaran (*do – feel – learn adoption*). Dalam proses ini

penyebarluasan gagasan memerlukan dukungan secara cepat dari kalangan khalayak atau adopter yang tingkat pendidikannya relatif rendah. Karena itu gagasan (inovasi) diupayakan diterima dulu, dari situ *adapter* merasakan manfaatnya kemudian mempelajari hal-hal yang mereka temukan dalam pengalamannya.

Proses penerimaan inovasi yang dimulai dengan lebih dahulu mempelajari sebuah produk, lalu menerimanya. Dari hasil pengalaman itu, lalu mereka merasakan (*learn – do – feel*).

Dalam konteks *multipath adoption*, yaitu suatu proses penerimaan inovasi dengan cara sintesis dari ketiga model sebelumnya. Di sini adaptor merespon suatu kepercayaan pada tingkat yang lebih rendah atau lebih tinggi. Gambaran kuadran keempat kemungkinan ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

Involvement



Gambar 1. Kuadran Tipe Proses Adopsi
Sumber: Kotler dan Roberto dalam Cangara, 2017:191

Menurut teori yang ada, target adaptor akan merasa puas terhadap suatu gagasan atau inovasi jika sesuai dengan harapannya, dan kapan kesesuaian itu memenuhi harapannya maka mereka akan mengulangi, bahkan mungkin juga mempromosikan kepada orang lain.

Mengenai waktu atau proses kecepatan penerimaan (penetrasi) suatu gagasan atau inovasi, Kotler membagi atas tiga macam, yakni;

1. *Rapid penetration diffusion*
2. *Gradual penetration diffusion*
3. *Contagionlike diffusion.*

Model difusi penetrasi cepat (*Rapid penetration diffusion*) bisa digunakan jika diperkirakan target adopter memiliki potensi untuk menerima perubahan lebih dari 40 persen dari total populasi yang ada. Angka ini bisa diperoleh melalui survey untuk melihatnya seberapa besar kemungkinan target adaptor yang bisa menerima gagasan tersebut. Model ini juga bisa digunakan jika produk yang ditawarkan hanya satu-satunya tanpa pilihan.

Model difusi penetrasi secara bertahap (*Gradual penetration diffusion*) jika gagasan yang akan ditawarkan itu diterima secara lambat oleh target adopter. Di sini penetrasi akan bergerak secara pelan sampai pada titik puncak. Ini biasanya dilaksanakan jika gagasan yang diperkenalkan pada beberapa daerah yang berbeda.

Dalam kondisi seperti ini perencana komunikasi bisa memilih dan menentukan daerah mana difusi inovasi bisa berjalan secara efektif.

Mengenai difusi penetrasi berjangkit (*contagionlike diffusion*) diperlakukan maka kita melakukan estimasi terhadap sejumlah kemungkinan yang bisa terjadi pada target adopter yang potensial, yakni target adopter dipengaruhi oleh non-adopter dimana media non-person turut memengaruhinya. Ada dua faktor yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah adopter yang bisa menerima suatu gagasan atau inovasi, yakni; pertama, harga dan biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk atau gagasan, dan kedua ialah efektivitas komunikasi dalam penyebarluasan gagasan kepada target sasaran. Di sini tingkat pengaruh banyak ditentukan dari target adopter kepada non-adopter terhadap kapasitas produk melalui komunikasi dari mulut ke mulut.

Ada lima hal yang bisa mempengaruhi tingkat penerimaan target adopter terhadap suatu gagasan, yakni:

1. Sikap target terhadap ide-ide baru
2. Produk yang dipasarkan itu cocok dengan budaya yang ada
3. Produk bisa demonstrasikan sehingga bisa disaksikan oleh target sasaran
4. Biaya dikeluarkan untuk produk itu. Di sini terkait biaya dengan faktor teknis dari produk itu apakah sulit diadopsi, dan biaya atau *cost* yang mungkin ada karena hilangnya

status quo dari target adopter (pengalaman yang biasa menggunakan barang lama)

5. Agen pembaharu atau penyuluh dari kampanye itu sendiri, termasuk dukungan politik.

Oleh sebab itu, penyebarluasan gagasan pembangunan tidak jauh beda dengan usaha-usaha untuk penyadaran masyarakat melalui kampanye atau penyuluhan sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat atas masalah yang mereka hadapi, ini dilakukan agar masyarakat lepas dari belenggu masalah dan keluar untuk berusaha yang lebih baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup mereka, baik untuk hari ini maupun untuk masa datang (Cangara, 2017:193).

2. Teori Advokasi dan Mobilisasi Masyarakat

a. Advokasi

Model ini diperkenalkan pertama kali oleh *Center for Communication Programs (CCP) Johns Hopkins University – USA* pada tahun 1988 dalam program Informasi Kependudukan yang didanai oleh USAID (*Us Agency for International Development*). CCP ini bergerak dalam bidang komunikasi strategis untuk kesehatan masyarakat, terutama dalam membangun dan menerapkan konsep dan teknologi baru untuk mengevaluasi kaitan antara promosi dan advokasi kesehatan dengan perubahan perilaku. Berarti model ini tidak bisa diaplikasikan untuk bidang lain, seperti usaha untuk

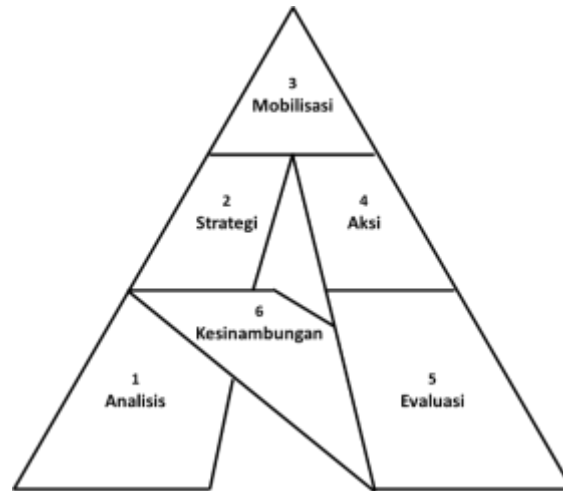
membangun kapasitas komunikasi strategis pada lembaga pemerintah maupun swasta di tingkat lokal dan nasional.

Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat.” (S. Reyes, *Local Legislative Advocacy Manual, Philippines: The Center for Legislative Development* dalam (Cangara, 2017:86). Pendapat lain yang dikutip dari *Manual Advokasi Kebijakan Strategis*, IDEA, (Juli 2003) (dalam Cangara, 2017:86), menyatakan bahwa Advokasi dimaksudkan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan, baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat dengan memasukkan masalah dalam agenda kebijakan, dan mengontrol para pengambil keputusan penegakan dan penerapan kebijakan publik yang dibuat untuk mengatasi masalah tersebut.

Sejalan dengan pengertian di atas, maka advokasi yang dimaksud di sini adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi persuasif. Kebijakan publik termasuk oleh pihak yang berwenang untuk membimbing atau mengendalikan perilaku lembaga masyarakat, dan individu.

Model perencanaan komunikasi untuk advokasi terdiri atas enam tahapan, yakni: a. analisis; b. Strategi; c. Mobilisasi; d. Aksi; e. Evaluasi; dan f. kesinambungan.

Gambar model perencanaan komunikasi untuk advokasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Model Perencanaan Komunikasi untuk Advokasi
 Sumber: *Center for communication Program Johns Hopkons Bloomberg School of Public Health dalam Cangara (2017:87)*

a. Analisis

Analisis merupakan langkah pertama untuk melaksanakan advokasi yang efektif, sebagaimana halnya langkah awal pada setiap aksi. Upaya kegiatan advokasi yang dirancang agar bisa berdampak pada kebijakan publik diawali dengan ketersediaan informasi yang akurat dan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang ada, masyarakat yang terlibat, kebijakan serta menjadi akses untuk mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan para pengambil keputusan. Semakin kuat dasar pengetahuan elemen tersebut, semakin meyakinkan advokasi yang dilakukan.

b. Strategi

Setiap usaha advokasi memerlukan strategi. Tahapan strategi dibangun berdasarkan tahapan analisis yang mengarahkan, merencanakan, dan memfokuskan upaya pada tujuan khusus, serta menempatkan pada jalur yang jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

c. Mobilisasi

Pembentukan koalisi untuk memperkuat advokasi. Peristiwa, kegiatan, pesan, dan materi pendukung harus dirancang sesuai dengan tujuan, kelompok sasaran, kemitraan, dan sumber-sumber yang ada. Kesemuanya ini harus memberi dampak positif yang maksimal bagi pembuat kebijakan dan partisipasi penuh dari semua anggota selain memperkecil kelompok oposisi.

d. Aksi

Mempertahankan kekompakan kegiatan aksi dan semua mitra merupakan hal yang mendasar dalam pelaksanaan advokasi. Pengulangan pesan dan penggunaan alat bantu yang kredibel yang dibuat secara berulang sangat membantu untuk dapat mempertahankan perhatian terhadap isu yang ada.

e. Evaluasi

Usaha advokasi harus dievaluasi secara seksama sebagaimana halnya dengan kegiatan kampanye lainnya. Karena

kegiatan advokasi sering membuahkan hasil yang parsial. Tim advokasi perlu memonitor secara rutin dan objektif apa yang telah dicapai dan apa yang masih harus dikerjakan. Proses evaluasi bisa lebih penting dan lebih sulit daripada dampak evaluasi.

f. Kesenambungan

Seperti halnya komunikasi, advokasi adalah sebuah proses yang berlangsung terus-menerus. Bukan sekadar sebuah kebijakan atau peraturan. Perencanaan terhadap kesinambungan berarti memperjelas tujuan jangka panjang, mempertahankan keutuhan fungsi koalisi, dan menyesuaikan data argumentasi, seiring dengan perubahan yang terjadi.

b. Memobilisasi Kelompok Berpengaruh

Dalam berbagai program komunikasi, apakah itu penyadaran masyarakat, pemasaran, promosi, kampanye politik, selain dilakukan dalam bentuk media maka memobilisasi massa juga perlu dilakukan. Mobilisasi dilakukan dengan menggerakkan masyarakat untuk bisa mengerti, memahami, dan menerima program-program yang ditawarkan. Untuk menggerakkan atau memobilisasi masyarakat tentu tidak mudah, apalagi dalam situasi reformasi di mana orang merasa sudah tidak terlalu tergantung pada orang lain. Sikap individualisme dan kapitalisme lebih menonjol ketimbang solidaritas kelompok.

Namun di beberapa Negara sedang berkembang di Asia Afrika dan Amerika Latin, masih ditemui warga dalam mengambil keputusan

masih tergantung pada tokoh-tokoh formal dan informal, khususnya mereka yang masih tinggal di daerah pedesaan. Para warga memiliki hubungan yang sangat erat dengan para tokoh-tokoh formal dan informal ini. Tokoh formal misalnya camat, kepala desa, kepala kampung, ketua RW/RT. Sedangkan tokoh non formal misalnya imam desa, guru-guru, tetua adat, punggawa dan sebagainya. Para warga pada umumnya hanya bisa menerima sesuatu pembaruan jika para tokoh-tokoh masyarakat yang mereka panuti lebih dulu menerima perubahan itu.

Ciri-ciri tokoh masyarakat yang terdapat di daerah pedesaan, antara lain;

- 1) Lebih berpendidikan
- 2) Lebih tinggi status ekonominya
- 3) Diterpa oleh media komunikasi
- 4) Kosmopolit
- 5) Inovatif
- 6) Memiliki partisipasi sosial yang tinggi
- 7) Memiliki kontak dengan agen pembaharu (komunikator pembangunan)
- 8) *Concern* dengan sistem budaya setempat
- 9) *Homophily* dengan lingkungan masyarakatnya

Untuk menggerakkan masyarakat agar bisa menerima program-program yang dikomunikasikan, maka peran tokoh-tokoh

masyarakat sangat penting. Seorang perencana komunikasi yang profesional akan tahu dan bisa menghubungi para tokoh-tokoh masyarakat ini untuk memperoleh dukungan terhadap program yang ditawarkan.

Selain dengan cara melalui media dan tokoh masyarakat, cara lain yang bisa digunakan agar orang bisa tertarik terhadap suatu program, antara lain; memberi kupon berhadiah, pemberian sampel cuma-cuma, bonus “membeli dua dapat tiga”. Cara-cara seperti ini disebut metode pelatuk atau pemicu (*trigger*) untuk merangsang target sasaran untuk ikut memiliki produk.

Untuk menggerakkan atau memobilisasi massa, dapat digunakan saluran komunikasi, antara lain:

- 1) Saluran komunikasi publik dengan cara memobilisasi massa untuk menghadiri rapat akbar, panggung terbuka, pertunjukan musik, turnamen olahraga, pasar murah dan sebagainya.
- 2) Saluran komunikasi sosial melalui kegiatan arisan, pengajian, khitanan, perkawinan, upacara kelahiran, pos ronda, pesta panen, rukun kampung, peringatan hari raya, ulang tahun. Dalam media baru bisa digunakan *Facebook*, *Twitter*, *Blog (my space)*, *Linkedlin* (bisnis dan profesional), *Friendster*, *devianART (digital art)*, *wayn* dan *Couchsurfing (traveling)*, *Flickr* (berbagi foto).
- 3) Saluran komunikasi antarpribadi misalnya surat, telepon, sms, anggota keluarga dekat, tetangga, sahabat dan teman kantor.

3. Penetapan Strategi dan Analisis SWOT

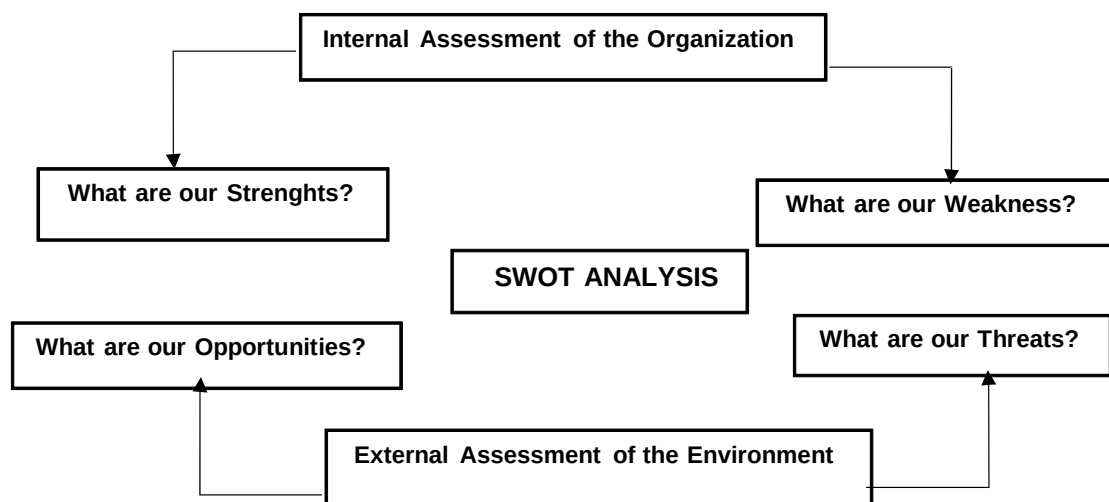
Dalam hal merumuskan strategi yang handal, dibutuhkan analisis situasi sebagai langkah awal. Analisis situasi diperlukan sebagai bagian dari strategi efektif untuk mencapai tujuan. Dalam analisis situasi dikenal dengan rumus analisis SWOT yang merupakan akronim dari *Strengths* (Kekuatan-kekuatan), *Weakness* (Kelemahan-kelemahan), *Opportunities* (Peluang-peluang) dan *Threats* (Ancaman-ancaman). Analisis SWOT bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal disamping peluang dan ancaman eksternal. Analisis SWOT diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perumusan strategi untuk mencapai tujuan (Ayuningtyas, 2013:65).

Penetapan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam setiap program komunikasi. Sebab jika penetapan strategi salah satu keliru maka jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan bisa gagal, terutama kerugian dari segi waktu, materi dan tenaga. Strategi juga merupakan rahasia yang harus diamankan oleh para ahli perencanaan komunikasi, utamanya dalam kampanye politik dan pemasaran komersial.

Analisis SWOT ialah peralatan analisis yang bisa digunakan untuk mengukur S=*Strengths*–Kekuatan-kekuatan yang dimiliki, W=*Weakness*-Kelemahan-kelemahan yang ada, O=*Opportunities*-

Peluang-peluang yang mungkin bisa diperoleh, dan T=*Threats*-Ancaman-ancaman yang bisa ditemui.

Kaitan antara keempat elemen analisis tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Model Analisis SWOT

Dari keempat komponen yang digunakan dalam Analisis SWOT, maka komponen kekuatan dan kelemahan berada dalam ranah internal organisasi. Kedua komponen ini erat hubungannya dengan sumber daya dan manajemen organisasi, karena itu disebut sebagai asesmen internal organisasi. Sedangkan komponen Peluang dan ancaman berada dalam ranah eksternal organisasi. Peluang dan ancaman ini terjadi karena hasil dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Kedua komponen ini banyak ditentukan oleh kemampuan komunikasi, jaringan, dan kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, dalam perencanaan komunikasi orang yang akan ditunjuk untuk menjadi komunikator sedapat mungkin memiliki

keterampilan komunikasi, jaringan, dan kemampuan untuk menjalin kerja sama sehingga bisa menjembatani antara kepentingan organisasi dengan calon pembeli, pelanggan, masyarakat pemilih (konstituen), media, dan pemerintah (Cangara, 2017:106-109).

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Berikut ini adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan Strategi komunikasi lingkungan.

1. Strategi Komunikasi Lingkungan Kelompok Peduli Alam Sekitar (KEMPAS) dalam Mengelola Ekowisata Mangrove Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Hadikurnia, 2019. Sumber: Jurnal FISIP Vol.6.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Strategi komunikasi lingkungan yang telah dilakukan KEMPAS yaitu melalui beberapa tahap. *Pertama*, tahap assessment/penilaian yang meliputi analisis situasi dan identifikasi situasi dan identifikasi masalah sosial, ekonomi, lingkungan, Analisis pihak/pelaku yang terlibat, Komunikasi objektif (untuk meningkatkan/perilaku). *Kedua*, tahap perencanaan yang meliputi pengembangan strategi komunikasi, Memotivasi dan memobilisasi masyarakat, Pemilihan media. *Ketiga*, tahap produksi yang meliputi desain pesan yang akan disampaikan, Produksi media disertai pretest. *Keempat*, tahap pelaksanaan yang meliputi penyebaran melalui media dan implementasinya, Dokumentasi dan Evaluasi.

- b. Pembinaan yang telah dilakukan dari beberapa instansi pemerintah seperti dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup terkait program ekowisata mangrove yaitu, dengan memberikan sosialisasi, pembinaan (diskusi, pelatihan, lomba) pelatihan, monitoring, fasilitator dan juga memberikan bantuan berupa bibit bakau.
- c. Diperlukannya strategi komunikasi yang tepat agar tercapainya kesepahaman bersama (*mutual understanding*) dalam menentukan keputusan untuk menunjang keberhasilan program ekowisata mangrove. Model komunikasi yang digunakan Kelompok Masyarakat Peduli Alam Sekitar/KEMPAS yaitu model komunikasi konvergensi Kincaid. Model komunikasi konvergensi dianggap lebih efektif dan efisien dalam mencapai kesepahaman bersama dalam suatu musyawarah.

Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

2. Studi Komunikasi Lingkungan Melalui Komunikasi Kelompok Terhadap Edukasi Pengelolaan Lingkungan dengan Pendekatan Teori Strukturasi Adaptif pada Masyarakat Kota Malang. Aldino dkk, 2020. Sumber: Jurnal LINIMASI.

Hasil Penelitian ini adalah dua hal yang mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai kelurahan tangguh sebagai wadah pengelolaan lingkungan, pertama adalah pengetahuan dan pemahaman dengan cara mengumpulkan informasi mengenai lingkungan secara mandiri, mempertimbangkan pendapat mengenai

masalah lingkungan, menghargai cara-cara dimana isu mengenai lingkungan saling terkait, mengevaluasi informasi tentang lingkungan dari berbagai sumber, mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut serta memahami dan mengetahui mekanisme untuk membawa perubahan lingkungan kepada masyarakat. Kedua adalah sikap dan perilaku dengan cara mengembangkan sikap peduli terhadap masalah lingkungan, menjadi kritis terhadap isu lingkungan, mengambil tindakan sendiri untuk mengubah perilaku, memiliki keinginan untuk berpersepsi dalam merawat lingkungan, berpersepsi dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan yang dapat diketahui publik. Pendapat informan satu dari 8 informan, menyatakan kendala dalam mengedukasi pengelolaan lingkungan sebagai antisipasi datangnya bencana adalah sebagai berikut: "Pemahaman masyarakat akan kebencanaan masih kurang, kedua hal-hal kebencanaan masih asing ditelinga mereka. Pemahaman mereka hanya sebatas kalo hujan ya banjir kalo tidak longsor. Sebenarnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati tapi masyarakat tidak tau akan kebencanaan." (Wawancara pada hari Rabu, 5 Desember 2018 di Kantor BPBD Kota Malang).

Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik untuk menyelidiki kehidupan individu, kelompok, masyarakat dan organisasi. Sebagian besar analisis dilakukan dengan kata-kata yang dikumpulkan dan dipecah menjadi

beberapa segmen lalu peneliti akan membandingkan, menganalisis dan membangun pola dari data tersebut. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Selanjutnya dilakukan FGD dengan subjek penelitian adalah masyarakat di Kelurahan Bandungrejosari. Data yang dikumpulkan melalui FGD antara lain : 1) Pengalaman yang pernah dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bandungrejosari dalam mengikuti kegiatan kelurahan tangguh, 2) Kendala apa saja yang dialami selama terlibat dalam kegiatan kelurahan tangguh, 3) Tanggapan mengenai pembentukan kelurahan tangguh, 4) Harapan dengan terbentuknya kelurahan tangguh. Data penelitian menggunakan analisis data model Interaktif Miles dan Huberman.

3. Komunikasi Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Kawasan Wisata (Studi Deskriptif Pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Di Kawasan Wisata Mandeh) Tan dkk, 2019. Sumber: Jurnal Komunikasi.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa DLH sudah melakukan berbagai upaya dalam komunikasi untuk menjelaskan mengenai dampak lingkungan, namun pemerintah sendiri masih belum mampu memberikan aturan dan sanksi tegas pada pelanggar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di kawasan Wisata Mandeh.

Beberapa kegiatan komunikasi lingkungan yang dilakukan oleh DLH berdasarkan perencanaan yang diterapkan adalah sosialisasi yang dilakukan dengan teknik marathon, FGD dengan pihak akademis dan penggiat lingkungan dari universitas, pembinaan

pada masyarakat, pelatihan, dan pembentukan komunitas lingkungan, selain itu DLH tidak hanya menggunakan cara langsung berkomunikasi dengan masyarakat dan investor, kecanggihan teknologi komunikasi saat ini juga dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh DLH, diantaranya yaitu menyuarakan mengenai upaya pencegahan kerusakan lingkungan melalui SPM TV yaitu siaran TV milik kabupaten sendiri, lalu siaran radio kabupaten, Baliho menjaga lingkungan yang dipasang pada tempat strategis sehingga mudah dilihat, plang perangan proyek yang diberhentikan kegiatannya karena melanggar zonasi dan tanpa izin lingkungan, pemberitaan di Koran cetak dan online berdasarkan statement Bupati yang sudah koordinasi dengan DLH, memberikan pengarahan menjaga lingkungan yang benar melalui facebook dan website DLH, serta broadcast dari grup WhatsApp sehingga mudah untuk saling membagikan.

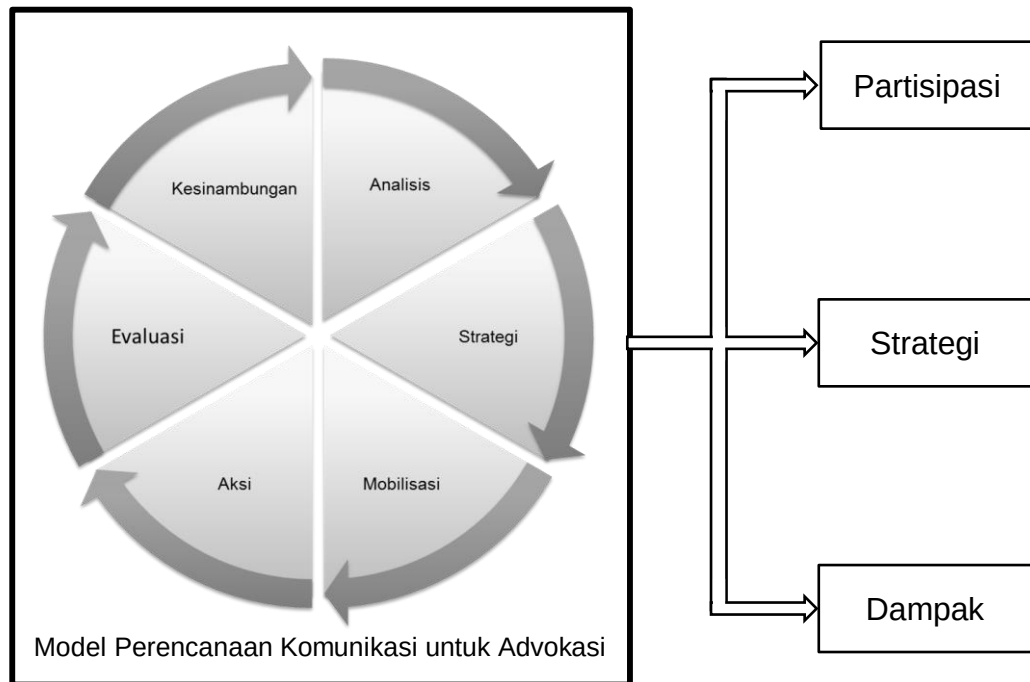
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis merujuk pada Creswell (2013:11) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan studi kasus untuk mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komunikasi lingkungan pada pemerintah Kabupaten menangani komunikasi lingkungan pada kawasan Wisata Mandeh saat ini. Dengan pengumpulan data melalui

wawancara semi-terstruktur dan observasi terus terang. Subjek dan objek penelitian yaitu DLH dan kawasan Wisata Mandeh, dimana yang dilihat adalah komunikasi lingkungan DLH. Informan ditentukan dengan purposive sampling, merujuk pada buku (Afrizal, 2014: 140-141) yang mengatakan langkah ini memberikan kriteria yang sudah ditentukan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan. Terdapat empat orang informan yang sudah ditentukan kriterianya, umumnya adalah dari DLH. Mereka yang berperan dalam memberikan komunikasi pada masyarakat dan investor di Kawasan Wisata Mandeh. Teknik analisis data dari Miles dan Huberman.

D. Kerangka Pikir

Untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, diperlukan suatu proses dan prosedur penelitian yang efektif dan sedapat mungkin efisien. Oleh karena itu perlu disusun kerangka pikir penelitian yang dapat memberikan gambaran dan arahan agar penelitian berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang berkualitas. Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk mengetahui alasan Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Mangrove Di Dusun Tanroe Kabupaten Pinrang menggunakan strategi Komunikasi Lingkungan, bagaimana Partisipasi Masyarakat memanfaatkan mangrove sebagai aktivitas menjaga lingkungan di sekitar pesisir Kabupaten Pinrang serta apakah ada kendala yang dihadapi Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi

Mangrove sebagai strategi Komunikasi Lingkungan di Dusun Tanroe
Desa Bababinanga Kabupaten Pinrang.



Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Dikutip dari *Center for Communication Program Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health* (Flor dan Cangara, 2013)

E. Definisi Konseptual

Berdasar pada kerangka pikir penelitian, berikut ini definisi konsep dan operasional yang digunakan dalam penelitian:

- a. Model Perencanaan Komunikasi untuk Advokasi adalah proses perencanaan komunikasi yang menekankan keterkaitan aspek Analisis, Strategi, Mobilisasi, Aksi, Evaluasi, dan Kesenambungan dalam rehabilitasi mangrove. (a) Analisis memiliki indikator advokasi efektif, ketersediaan informasi yang akurat, pemahaman tentang permasalahan, masyarakat terlibat

- mempengaruhi tokoh-tokoh berpengaruh dan para pengambil keputusan. (b) Strategi memiliki indikator memfokuskan pada tujuan khusus dan sasaran yang ditentukan. (c) Mobilisasi memiliki indikator pembentukan koalisi, peristiwa kegiatan, pesan dan materi pendukung, partisipasi penuh semua anggota untuk memperkecil kelompok oposisi. (d) Aksi memiliki indikator pengulangan pesan dan penggunaan alat bantu yang kredibel yang dibuat secara berulang. (e) Evaluasi memiliki indikator memonitor secara rutin dan objektif terhadap apa yang dicapai dan apa yang harus dikerjakan. (f) Kesiambungan memiliki indikator memperjelas tujuan jangka panjang, mempertahankan keutuhan fungsi koalisi dan menyesuaikan data argumentasi.
- b. Partisipasi memiliki indikator partisipasi dalam pelaksanaan, evaluasi, menarik manfaat, dan pengambilan keputusan.
 - c. Strategi Komunikasi Lingkungan adalah suatu rancangan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai komunikator.
 - d. Dampak adalah pengaruh yang dihasilkan oleh partisipasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Dampak memiliki indikator pemeliharaan ekosistem lingkungan.

F. Hipotesis

- H1. Ada hubungan yang signifikan antara sosialisasi yang intensif dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap rehabilitasi tanaman mangrove di Dusun Tanroe Kabupaten Pinrang.
- H2. Ada hubungan yang signifikan antara penggunaan terminologi teknis di bidang lingkungan dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap rehabilitasi mangrove di Dusun Tanroe Kabupaten Pinrang.
- H3. Ada hubungan yang signifikan antara ketersediaan bibit mangrove dengan pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Dusun Tanroe Kabupaten Pinrang.
- H4. Ada hubungan yang signifikan antara pasang surut yang ekstrim dengan tumbuhnya bibit dalam rehabilitasi mangrove di Dusun Tanroe Kabupaten Pinrang.
- H5. Ada hubungan yang signifikan antara keterlibatan tokoh masyarakat setempat dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap rehabilitasi mangrove di Dusun Tanroe Kabupaten Pinrang.
- H6. Ada hubungan yang signifikan antara keterlibatan pemerintah setempat sebagai pejabat formal dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap rehabilitasi mangrove di Dusun Tanroe Kabupaten Pinrang.
- H7. Ada hubungan yang signifikan antara perluasan tambak dengan upaya rehabilitasi mangrove di Dusun Tanroe Kabupaten Pinrang.